

Priyo Budi Santoso

Reformasi, Demokrasi Praktis atau Demokrasi Substantif?



Reformasi sudah bergulir 10 tahun. Transisi ini banyak dikhawatirkan berbagai kalangan karena cenderung kontra-produktif dengan gagasan awal. Seolah gagasan reformasi melenceng dari konsep awal. Banyak rakyat yang kemudian rindu pada masa lalu ketika konflik terjadi dimana-mana, harga melambung tinggi, ekonomi paceklik, dan hidup makin sulit.

Kekhawatiran ini juga yang dirasakan oleh Priyo Budi Santoso, Ketua Fraksi Golkar DPR RI periode 2004-2009. Menurut Priyo Budi kebutuhan negara untuk mensejahterakan rakyat justru pada titik yang mengkhawatirkan. Ironisnya hal itu timbul atas nama demokrasi padahal masyarakat mulai bosan dengan simbol-simbol reformasi. Menurutnya hal itu terjadi karena tidak tercapainya hakekat dan tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. "Orang tidak bisa makan yang namanya demokrasi. Demokrasi hanyalah sebuah alat dan sarana untuk mensejahterakan rakyat," katanya.

Salah satu ikon reformasi dan menjadi faktor paling fundamental, menurutnya dengan adanya perubahan konstitusi. UUD 1945 yang berlaku sekarang merupakan hasil amandemen yang telah meletakkan posisi lembaga kenegaraan dan sistem perpolitikan. Selain itu hasil reformasi lainnya menyangkut diperkuatnya peran daerah melalui otonomi daerah dan semakin banyak kalangan sipil yang menduduki jabatan publik dan politik. Bagi Priyo Budi, ini menjadi arus besar perubahan dimana dia pun masuk dalam arus besar itu. Karena dengan demikian dirinya terlibat dalam perubahan untuk menata kembali tata kehidupan baru dan seterusnya. Ini dikarenakan namanya tercatat sebagai anggota DPR dari Golkar sejak tahun 1997 atau satu tahun menjelang transisi itu. Golkar sebelum peralihan kekuasaan menjadi partai mayoritas di parlemen. Sementara pada pemilu pertama sejak peralihan itu Golkar menempati peringkat kedua.

Dalam catatannya, suasana saat itu menjelang tumbangnya Presiden Soeharto, permintaan perubahan (reformasi) seperti air bah. Dan ketika

rejim lama tumbang muncul keinginan untuk merubah semua lini yang meliputi hampir semua tata kehidupan politik. Keinginan dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik terus membunyah. Tetapi kesejahteraan yang diharapkan rakyat banyak yang belum terwujud. Ini yang dimata Priyo Budi

Santoso menjadi masalah besar. "Yang terjadi setelah reformasi terjadi euforia terhadap kemenangan demokrasi. Hal ini tentu tak pernah terbayangkan sebelumnya," ungkap Priyo.

Dia mengaku sangat mencemaskan kondisi ini ketika masyarakat berada di titik balik.



"Saya merasa ini seperti akan kiamat sebab rakyat mulai bosan dan mulai membandingkan pada zaman dulu (orde baru) yang disebut otoriter tetapi suasana tenteram, aman, makan enak, dan merasa lebih nyaman daripada jaman sekarang yang mudah ada pergolakan dan pergesekan," paparnya.

Dimata anggota DPR termuda nomor dua tahun 1999 ini, pergolakan menjadi sangat sering dan mengatasnamakan demokrasi seperti pertentangan antar etnik dan dukung mendukung dalam pilkada.

Padahal otonomi daerah yang dibangun dengan semangat reformasi bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan potensi daerah. Kenyataannya kini yang terjadi, menurut Priyo Budi, adalah munculnya egoisme kedaerahan dan gerakan-gerakan separatis.

Membangun Pemerintahan yang kuat

Ayah empat anak ini merasa berada pada posisi dan saat yang tepat. Keberadaannya di Partai Golkar membuat jiwanya kembali hidup seperti ketika masih menjadi aktifis mahasiswa. Idealisme-idealisme itu kembali bersemi bersama partai besar ini dengan mencoba menerapkan tradisi kritis dan tradisi dialogis yang cerdas di dalam lingkungan partai. Dalam hampir semua keputusan politik penting mengenai arah negara dirinya selalu ambil bagian.

Berangkat dari posisi dan kecemasan akan jalannya reformasi menjadi salah satu dari banyak pertimbangan keinginan untuk memformat ulang bangunan ideal republik ini. "Itu kenapa saya pagi-pagi sering mengungkapkan bahwa siapapun presiden republik ini, sehebat

apapun dia, keturunan raja maupun dewa-dewa sekalipun kalau tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen tidak akan efektif," katanya.

Karena, lanjutnya, kekuasaan negara sudah terbagi menurut UUD 45 hasil amandemen dimana posisi parlemen yang semakin signifikan. "Saya tidak mengatakan dominan karena dominasi masih di eksekutif. Namun saya memimpikan bahwa kedepan harus ada pemerintahan yang kuat," ujarnya. Hal itu disebabkan terdapat cabang-cabang kewenangan lainnya yang berada di parlemen.

"Karena itu pemerintah harus didukung oleh parlemen yang kuat," paparnya. Karena itulah Priyo Budi menyerukan ijihad baru dalam politik yaitu presiden dipilih secara langsung dan harus mendapat dukungan dari parlemen.

Dia mengusulkan calon presiden

Priyo Budi Santoso
Politikus muda, berperan aktif merancang masa depan Indonesia



sejak awal itu harus membangun kekuatan politik yang riil di parlemen.

"Hanya dengan itu pemerintahan akan efektif mengerjakan dan menjalankan programnya. Bila tidak, pemerintah akan direpotkan oleh kewenangan-kewenangan lain yang sekarang menjadi kewenangan di parlemen atas nama demokrasi." Inilah yang disebutnya sebagai koalisi permanen.

"Koalisi permanen adalah koalisi yang dibangun dan diikhtikarkan untuk mengawal kepemimpinan itu sejak awal." katanya, "Kekuatan politik yang ada sudah harus memilih presiden dan wakilnya". Maka menurut mantan Ketua Senat UGM ini bila calon itu menang maka akan menguasai pemerintahan tetapi bila kalah akan menjadi oposisi yang tidak kalah terhormatnya dengan pemerintah. Baginya ini hanya soal pembagian tugas dan menjadi lebih jujur ketimbang koalisi rapuh seperti yang ditunjukkan seperti sekarang. Dia mencontohkan partai-partai yang ikut dalam koalisi itu tidak selalu dapat mengamankan kebijakan pemerintah meskipun terdapat kader-kader partai yang duduk dalam kabinet.

Demokrasi ala Indonesia

Kegelisahan lain yang ditangkap oleh Priyo Budi mengenai pemilihan langsung kepala daerah seperti Gubernur, Walikota dan Bupati ini. Dalam benak politisi muda ini muncul pertanyaannya untuk kembali pada pola lama dengan pemilihan tidak langsung. Sementara pemilihan langsung hanya pada Presiden dan Wakil Presiden saja. Baginya hal ini demi efisiensi, hemat energi, anggaran dan terutama kembali pada solidaritas sebagai bangsa.

"Saya kira, perlu ada pemikiran berani dari kita untuk menata kembali. Walau belum tentu ini bisa diterima tapi pemikiran ini harus muncul," katanya.

Kegelisahan lain yang tumbuh dalam pandangan Priyo Budi dengan munculnya "raja-raja baru" di daerah, khususnya di kabupaten dan kotamadya. Mental ini membuat banyak Bupati dan Walikota tidak mau lagi berada pada jalur birokrasi karena merasa sudah dipilih langsung oleh rakyat. "Ujung-ujungnya pelayanan



kepada publik dan pelayanan kepada rakyat terganggu.

"Karena itu kita perlu me-reformat atau format ulang masalah mengenai otonomi daerah ini," katanya.

Meskipun demikian, Priyo Budi menyatakan tidak ingin mengembalikan pada pola sentralistik seperti jaman sebelumnya. Tetapi ide-ide baru harus terus digelontorkan. Kemungkinan masih ada implementasi yang salah dalam penerapan otonomi daerah ini.

"Demokrasi kita itu demokrasi ala Indonesia. Tidak revolusioner, tidak bersifat bumi hangus tapi demokrasi yang akan kita raih dengan gerak dinamika masyarakat kita. Itu yang kita sebut demokrasi ala Indonesia," katanya.

Membangun format demokrasi

Baginya negara ini harus diselamatkan dengan membuat format demokrasi yang harus dibangun ulang.

"Saya tak ingin memutar gerak jarum sejarah kembali ke masa-masa otoriter. Sejarah itu jangan dikembalikan tetapi masa depan harus kita reposisi segera."

Dia berharap jangan atas nama eforia reformasi yang terjadi malapetaka bagi keinginan kita untuk membangun demokrasi. "Karena itu saya menyerukan kepada seluruh pemimpin-pemimpin nasional, termasuk pemimpin masyarakat tingkat lokal, sudah saatnya kita berani menggugat beberapa keinginan kita untuk memformat kembali bangunan ideal bangsa kita kedepan," katanya.

Priyo Budi juga berharap kepada pemimpin senior di atasnya untuk menunjukkan kepada generasi penerus mengenai perdamaian dan tidak menonjolkan hiruk pikuk pertentangan diantara para pemimpin. 🗣️

(lui/ndi)